



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188 / 0162 / 432.131 / 2013

NOMOR : 170 / 1 / 432.200 / 2013

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
TAHUN 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dr.KH.KHOLILURRAHMAN,SH,MSi** : **BUPATI PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten PAMEKASAN yang beralamat Jalan Pamong Praja nomor 01 Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. a. **H A L I L I** : **Plt. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- b. **H. MOH. SAHRAWI, BA.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- c. **H.M.MUHDLAR ABDULLAH,SH,MM** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- d. **KHAIRUL KALAM,S.Sos.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten 107 - Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan no. 1 Tahun 2013 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyepakati dan/atau menyetujui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Program Legislasi Daerah Tahun 2013 memuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah, baik dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, yang akan dibahas pada tahun 2013;

- (2) Daftar Usulan Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Judul Rancangan Peraturan Daerah yang baku atau tetap, bisa disesuaikan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- (4) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila substansinya ada kesamaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang lain, maka bisa dijadikan satu Judul Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Program Legislasi Daerah Tahun 2013 diupayakan dibahas dan ditetapkan berdasarkan urutan skala prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Legislasi Daerah Tahun 2013.

Pasal 3

Jika Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2013 belum bisa dibahas pada Tahun 2013, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diprioritaskan masuk dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2014.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Pamekasan
pada tanggal : 8 Januari 2013

**PIHAK KESATU
BUPATI PAMEKASAN**


Dr. KH. KHOLILURRAHMAN, SH, MSi.

**PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

PIH. KETUA,


H. A. L I L I

WAKIL KETUA,


H. MOH. SAHRAMI, BA.

WAKIL KETUA,


H. M. MUHDLAR ABDULLAH, SH. MM.

WAKIL KETUA,


KHAIROL KALAM, S. Sos.

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/ 0162 /432.131/2013

NOMOR : 170/ 1 /432.200/2013

TANGGAL : 8 JANUARI 2013

PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PENGUSUL
1	2	3
1.	Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum	PIHAK KESATU
2.	Pembentukan Peraturan Desa	PIHAK KESATU
3.	Tata Kelola Hotel dan Tempat Penginapan/Kos	PIHAK KEDUA
4.	Pengelolaan Sumber Daya Air	PIHAK KEDUA
5.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum	PIHAK KEDUA
6.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura	PIHAK KEDUA
7.	Tata Kelola Bahan Pupuk Organik	PIHAK KEDUA
8.	Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Pemukiman dari Pengembang ke Pemerintah Daerah	PIHAK KEDUA
9.	CSR (Pertanggungjawaban Sosial)	PIHAK KEDUA
10.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	PIHAK KEDUA
11.	APBD TA. 2014	PIHAK KESATU
12.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	PIHAK KESATU
13.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013	PIHAK KESATU
14.	Dana Cadangan Pilkada Tahun 2018	PIHAK KESATU
15.	Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Aneka Usaha Mekkasas Makmur	PIHAK KESATU
16.	Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang dalam Kab. Pamekasan	PIHAK KESATU
17.	Retribusi Pelabuhan	PIHAK KESATU
18.	Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Penyusunan Zonasi	PIHAK KESATU

19.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pamekasan Tahun 2013 – 2017	PIHAK KESATU
20.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Pamekasan Tahun 2005 – 2025	PIHAK KESATU
21.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waru	PIHAK KESATU
22.	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	PIHAK KESATU
23.	Penanggulangan Kemiskinan	PIHAK KEDUA
24.	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik	PIHAK KEDUA
25.	Pedoman Pembentukan RT/RW Kelurahan dan Desa	PIHAK KEDUA
26.	Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat	PIHAK KEDUA
27.	Penanggulangan Bencana	PIHAK KEDUA
28.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PIHAK KEDUA
29.	Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan	PIHAK KEDUA
30.	Pandai Membaca Al-Qur'an	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU
BUPATI PAMEKASAN,**


Dr.KHOLIKURRAHMAN,SH,MSI

**PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
PI. KETUA,**


WAKIL KETUA,
H.M.MUHDLAR ABDULLAH,SH,MM.

WAKIL KETUA,


H. MOH. SAHRAWI,BA.

WAKIL KETUA,


KHAIRUL KALAM,S.Sos.